



Amalia Zata Yumni<sup>1</sup>  
 Zahra Puspita Eka  
 Putri<sup>2</sup>  
 Ziofari Baldi Amanta<sup>3</sup>  
 Dian Fitriani Afifah<sup>4</sup>

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG)

### Abstrak

Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga. Penelitian ini secara mendalam menganalisis peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam upaya mencapai kemandirian pangan pokok. Melalui kajian kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkorelasikan berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan dengan data produksi pangan lokal. Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program-program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model pembangunan pertanian berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika pangan lokal.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Peran Pemerintah, Kemandirian Pangan, Pangan Pokok

### Abstract

Food Independency refers to a nation's ability to produce enough food to meet the needs of its population, supported by a robust food security \institutional framework. This study conducts an in-depth analysis of the strategic role of the Sumedang District Government, particularly the Department of Agriculture and Food Security, in achieving staple food self-sufficiency. Through a qualitative approach, this research identifies, evaluates, and correlates various programs and policies implemented with local food production data. Further analysis is conducted on the internal and external factors influencing the success of these programs. The research findings are expected to provide empirical contributions to the development of a sustainable agricultural development model that is responsive to the dynamics of the local food system.

**Keywords:** Local Government, Government Role, Food Independence, Staple Foods

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kemandirian pangan menjadi isu strategis yang menjadi fokus pemerintah dan masyarakat, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam memastikan setiap masyarakat mendapatkan akses pangan yang layak untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, telah menunjukkan komitmennya dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan di wilayahnya. Perda ini mengatur berbagai upaya yang

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
 email: amalia23005@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, zahra23009@mail.unpad.ac.id<sup>2</sup>,  
 ziofari23001@mail.unpad.ac.id<sup>3</sup>, dian.fitriani@unpad.ac.id<sup>4</sup>

harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian dan mendukung produktivitas pangan lokal.

Selain melalui pengaturan lahan, terdapat gagasan-gagasan konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan peran beras sebagai pangan pokok masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya tersebut dapat meliputi peningkatan produktivitas beras, stabilisasi harga, serta pengembangan sistem distribusi dan logistik yang efektif.

Melalui penelitian ini, kami akan mengkaji secara mendalam mengenai peran pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya terkait implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 serta upaya-upaya lainnya dalam mewujudkan kemandirian pangan di wilayahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan, khususnya terkait optimalisasi beras sebagai pangan pokok masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa Saja Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Kondisi Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang? Apa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung?

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena pangan pokok, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kondisi kemandirian pangan di Kabupaten Sumedang. Metode penelitian kualitatif dipilih karena dinilai mampu menggali, mengumpulkan, dan menyajikan data deskriptif yang relevan dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi kemandirian pangan pokok di tingkat lokal (Creswell, 2014). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna dari fenomena yang kompleks melalui interaksi langsung dengan informan kunci dan sumber informasi lainnya.

### **Sumber Data**

Secara umum, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Burnley Douglas dalam resume oleh Victor O Ajayi (2017:3) data primer dan sekunder dapat berupa:

1. Data primer, dapat berupa survei, observasi, eksperimen, questioner, dan wawancara yang didapatkan dari sumber utama penelitian seperti pihak yang terlibat langsung atau pakar dalam bidangnya;
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dapat berupa laporan kinerja pemerintah, situs, buku, artikel jurnal dan catatan pribadi yang relevan dalam objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data juga merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

#### 1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber kunci, antara lain:

- a. Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan.
- b. Petani padi di Kabupaten Sumedang, untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka terkait dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas beras.

- c. Pelaku usaha di sektor distribusi dan perdagangan beras, untuk memahami dinamika pasokan dan harga beras di Kabupaten Sumedang.
- 2. Studi Literatur  
Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Sumedang.
- 3. Observasi Lapangan  
Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan potensi pengembangan sektor pertanian padi di Kabupaten Sumedang. Kegiatan observasi mencakup kunjungan ke sentra-sentra produksi beras, gudang penyimpanan, serta pasar tradisional.

**Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik komparatif untuk membandingkan perubahan dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyoroti perbedaan dan persamaan di setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, terutama dalam mekanisme pemilihan, pihak penyelenggara, dan persyaratan untuk calon kepala daerah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pangan Pokok Kabupaten Sumedang**

Pangan pokok merupakan makanan yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat, menjadi sumber asupan karbohidrat utama, dan mengenyangkan. Pangan pokok adalah fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sebagai sumber karbohidrat utama, pangan pokok berperan penting dalam memberikan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Pilihan pangan pokok sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, budaya, ketersediaan, harga, dan tingkat pendapatan masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi landasan hukum yang krusial bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan. Perda yang ditetapkan dan diundangkan pada 3 Agustus 2022 ini hadir sebagai respons strategis terhadap kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dalam melindungi lahan pertanian pangan di Kabupaten Sumedang. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan dan pemanfaatan lahan, sistem pengendalian alih fungsi lahan, hingga pemberdayaan petani dan peran serta masyarakat.

Susunan jenis makanan sehari-hari penduduk Kabupaten Sumedang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Bapak Iwan Gustiawan, S.Hut., M.P menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang memiliki beras sebagai pangan pokok masyarakatnya dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Sumedang yang memiliki kawasan agraris yang cukup memadai. Meskipun beras mendominasi sebagai pangan pokok, masyarakat Sumedang juga mengkonsumsi berbagai jenis pangan lain sebagai sumber karbohidrat. Singkong, jagung, kentang, dan ubi jalar, misalnya, sering diolah menjadi berbagai macam makanan tradisional. Namun, konsumsi komoditas-komoditas ini umumnya lebih bersifat musiman atau sebagai makanan pelengkap. Sedangkan, Agar suatu jenis makanan dapat dikategorikan sebagai pangan pokok suatu daerah, maka makanan tersebut harus menjadi pilihan utama sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakatnya. Dengan kata lain, makanan pokok adalah jenis makanan yang paling sering dikonsumsi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap asupan kalori harian masyarakat. Kriteria ini menunjukkan bahwa pangan pokok tidak hanya sekedar makanan yang enak dan mudah didapat, tetapi juga merupakan makanan yang secara budaya dan sosial telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tabel 1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Sumedang

| Jenis | Total Wilayah |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

| Pangan    | Kandungan Gizi   |                   | Berat Pangan  |                    |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|           | Energi Kkal/hari | Protein Gram/hari | Gram Per Hari | Kilogram Per Tahun |
| Beras     | 969.2            | 22.7              | 26.6          | 97.3               |
| Jagung    | 0.8              | 0.0               | 0.9           | 0.3                |
| Kentang   | 3.5              | 0.1               | 6.7           | 2.4                |
| Singkong  | 37.8             | 0.3               | 30.7          | 11.2               |
| Ubi Jalar | 14.3             | 0.1               | 11.2          | 4.1                |

Berdasarkan analisis Data Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Sumedang menunjukkan dominasi beras sebagai sumber karbohidrat utama bagi penduduk Kabupaten Sumedang. Dengan rata-rata konsumsi sebesar 266,6 gram per orang per hari, atau setara dengan 97,3 kilogram per tahun, beras telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan masyarakat Sumedang. Angka konsumsi yang signifikan ini jauh melampaui konsumsi komoditas lain seperti jagung, kentang, singkong, dan ubi jalar, yang umumnya dikonsumsi sebagai makanan pelengkap atau dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Dominasi beras sebagai pangan pokok di Sumedang merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor.

Produksi pangan pokok di Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, menunjukkan dinamika yang menarik dalam konteks kemandirian pangan daerah. Data tersebut menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melihat data produksi pangan pokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Program Pemuliaan Partisipatif yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari, misalnya, merupakan respons konkret terhadap kebutuhan pengembangan varietas padi lokal yang lebih produktif. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka produksi yang tercantum dalam tabel, tetapi juga menjamin keberlanjutan produksi melalui pengembangan varietas yang adaptif dengan kondisi lokal.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan pokok, pemerintah daerah telah mengembangkan sistem pendukung yang komprehensif. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sistem irigasi, dan penyediaan fasilitas pendukung produksi. Langkah-langkah ini secara langsung berkorelasi dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan angka produksi yang tertera dalam Tabel 1.

Pemberdayaan kelompok tani, termasuk kelompok tani wanita, juga menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan produksi pangan. Melalui program pemanfaatan lahan pekarangan dengan sistem pertanian terpadu, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi produksi pangan, tidak hanya dalam skala besar sebagaimana tercermin dalam tabel, tetapi juga dalam skala rumah tangga. Strategi ini menjadi pelengkap yang efektif dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sistem monitoring dan evaluasi yang diimplementasikan pemerintah daerah memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap tingkat produksi pangan. Data dalam Tabel 1 menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Melalui tim khusus yang dibentuk, pemerintah dapat melakukan analisis mendalam terhadap fluktuasi produksi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

Upaya stabilisasi pasokan dan harga yang dilakukan pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan data produksi dalam tabel tersebut. Pembentukan tim pengawas dan sistem pengendalian tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga memastikan bahwa hasil produksi dapat didistribusikan secara efektif kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam mengelola sistem pangan daerah, dari aspek produksi hingga distribusi. Program pemberdayaan petani yang berkelanjutan, yang mencakup

pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi pertanian modern, dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas sebagaimana tercermin dalam data Tabel 1. Melalui program-program ini, pemerintah daerah tidak hanya berupaya mempertahankan tingkat produksi yang ada, tetapi juga meningkatkannya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, data produksi pangan pokok dalam Tabel 1 menjadi cerminan dari efektivitas implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 dan berbagai program turunannya. Upaya pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian, memberdayakan petani, dan mengembangkan infrastruktur pendukung menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Sumedang. Keberhasilan program-program ini dapat dilihat dari stabilitas dan potensi peningkatan produksi pangan pokok sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat Kabupaten Sumedang dapat mudah mengakses beras karena persediaannya yang terpenuhi sepanjang tahun. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa mengkonsumsi beras sejak generasi ke generasi juga turut memperkuat posisi beras sebagai pangan pokok. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa beras telah membuktikan dirinya sebagai pangan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

### **Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang**

Pemerintah merupakan aktor utama dalam rangka melaksanakan dan mengatur segala urusan bernegara. Artinya, pemerintah memiliki peran yang sentral dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konsep desentralisasi yang membagi urusan-urusan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah pada tingkatan-tingkatan tertentu. Pembagian urusan pemerintah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian akhir undang-undang tersebut terdapat matriks tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di setiap sub urusannya, termasuk sub urusan tentang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian.

Dalam menjalankan sub urusan tentang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki wewenangnya. Pada tingkatan kabupaten/kota, termaktub bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam UU No.23 Tahun 2014, artinya Pemerintah Kabupaten Sumedang berperan dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di daerahnya.

Upaya untuk menciptakan kemandirian pangan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan angka produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir adanya impor pangan. Dalam konteks kemandirian pangan daerah, produksi pangan lokal daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan impor lebih tepatnya menerima pasokan pangan dari daerah lain. Untuk mencapai dua kondisi ini, tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yang dapat dituangkan dalam bentuk program dan kebijakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memiliki political will dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan pokok. Peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid seperti yang telah disampaikan pada tinjauan pustaka meliputi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dalam konteks pengupayaan kemandirian pangan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan peran tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk program dan kebijakan.

Berangkat dari salah satu peran pemerintah yaitu pemberdayaan (empowerment). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat atau lebih spesifiknya petani. Program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia dibawah oleh Bidang. Ketahanan Pangan dinas terkait. Salah satu program

pemberdayaan petani yang bernama "Sekolah Lapangan" merupakan program penyuluhan dua arah antara pihak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan para petani.

Program "Sekolah Lapangan" diinisiasi dengan tujuan untuk menjadi sarana skill upgrading untuk para petani. Selain itu, "Sekolah Lapangan" ini juga bertujuan untuk menjaring aspirasi yang artinya peran pelayanan (service) pun terjalani melalui program ini. Lebih jauh, program ini ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan terhadap para petani oleh 186 orang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Pendampingan yang dilakukan merupakan pendampingan yang berkepanjangan dimana para petani berhak meminta pendampingan kepada 186 orang pendamping tersebut saja.

Diluar program tersebut, kerap dilakukan program pemberdayaan lainnya oleh Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Seperti halnya bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepada penyuluh pertanian yang nantinya akan menjadi pendamping para petani dalam tindak lanjut program "Sekolah Lapangan".

Peran pemerintah yang selanjutnya dalam hal pembangunan (development) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sarana dan prasarana merupakan elemen yang terpenting dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan terkhusus beras. Perkembangan zaman berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam industri pertanian. Peralihan metode pertanian konvensional ke modern harus didukung oleh transformasi sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

Dalam hal transformasi sarana dan prasarana pertanian, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa upaya. Pertama, terdapat program pompanisasi untuk areal tanaman padi. Program pompanisasi ini ditujukan agar pengairan sawah dapat lebih terjamin, menghindari risiko kekeringan saat musim kemarau. Pada bulan April 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusulkan pengadaan 230 pompa air kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapannya ada peningkatan produksi padi, karena dengan adanya program ini, areal tanam padi akan bertambah. Tidak hanya pengadaan mesin pompa, pengadaan traktor untuk pertanian juga diupayakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Selain transformasi sarana dan prasarana pertanian, optimalisasi infrastruktur juga penting dalam mewujudkan kemandirian pangan. Infrastruktur berupa jalan yang bagus memberikan kemudahan bagi para petani untuk mengakses dan menjalani aktivitas pertaniannya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menginisiasi program Jalan Usaha Tani (JUT). Per tanggal 25 Maret 2024, tercatat sudah terdapat 46 titik JUT yang telah dibangun di berbagai kecamatan Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana hingga Rp10,8 miliar untuk pelaksanaan program JUT ini. Pengalokasian dana yang tidak sedikit ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengupayakan kemudahan akses bagi para petani.

Efektivitas peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan dapat dilihat dari tercapainya beberapa indikator kunci, seperti stabilitas produksi pangan pokok dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan, masih diperlukan penguatan program pemberdayaan petani, optimalisasi infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses terhadap teknologi modern.

### **Kondisi Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang**

Kemandirian pangan adalah salah satu pilar penting dan indikator utama dalam menciptakan serta mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, kemandirian pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dan bangsa untuk memproduksi pangan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara bermartabat. Di Kabupaten Sumedang, Kemandirian pangan menjadi isu strategis, terutama dalam kaitannya produksi beras lokal, yang merupakan pangan pokok masyarakat.

Tabel 2. Kemandirian Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang

| Bulan   | Ketersediaan (Ton) |              |                |              |               |                           | Kebutuhan (Ton) |                  |                 | Neraca          |
|---------|--------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|         | Stok awal          | Produksi GKG | Produksi Beras | Barang Masuk | Barang Keluar | Total Ketersediaan        | Rumah Tangga    | Non Rumah Tangga | Total Kebutuhan |                 |
| [1]     | [2]                | [3]          | [4]            | [5]          | [6]           | [7] = [2]+[4]+[5] = ([6]) | [8]             | [9]              | [10] = [8]+[9]  | [11] = [7]-[10] |
| Jan-24  | 21,633             | 23,832       | 13,762         | 1,673        | 11,285        | 25,783                    | 8,617           | 4,567            | 13,239          | 12,544          |
| Feb-24  | 12,544             | 30,824       | 17,801         | 1,251        | 6,052         | 25,554                    | 8,112           | 4,273            | 12,385          | 13,156          |
| Mar-24  | 13,159             | 71,03        | 41,019         | 1,296        | 29,944        | 25,53                     | 8,688           | 4,576            | 13,264          | 12,266          |
| Apr-24  | 12,266             | 45,857       | 26,482         | 1,26         | 14,565        | 25,433                    | 8,783           | 4,626            | 13,409          | 12,033          |
| May-24  | 12,033             | 27,948       | 16,139         | 1,414        | 8,887         | 20,71                     | 8,671           | 4,567            | 13,239          | 7,472           |
| Jun-24  | 7,472              | 53,853       | 31,099         | 1,332        | 18,659        | 21,243                    | 8,399           | 4,424            | 13,822          | 8,421           |
| Jul-24  | 8,421              | 39,030       | 21,692         | 1,4          | 13,177        | 18,606                    | 8,671           | 4,567            | 13,239          | 5,368           |
| Aug-24  | 5,368              | 48,445       | 27,976         | 1,389        | 16,786        | 17,947                    | 8,671           | 4,657            | 13,239          | 4,708           |
| Sept-24 | 4,708              | 32,699       | 18,889         | 1,363        | 9,442         | 15,512                    | 8,392           | 4,42             | 12,812          | 2,701           |
| Oct-24  | 2,701              | 26,7         | 15,495         | 1,352        | 3,092         | 16,42                     | 8,671           | 4,567            | 13,239          | 3,182           |
| Nov-24  |                    |              |                |              |               |                           |                 |                  |                 |                 |
| Dec-24  |                    |              |                |              |               |                           |                 |                  |                 |                 |

Sebagai salah satu wilayah agraris di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan regional dan nasional. Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, sektor ini memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang. Tulang punggung ekonomi di Sumedang berasal dari sektor pertanian, sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan menyumbang 20% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, produksi beras di Kabupaten Sumedang pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 230,582 ton. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga masyarakat Kabupaten Sumedang untuk beras pada periode yang sama hanya sebesar 85,729 ton. Dari data tersebut, sangat jelas bahwa Kabupaten Sumedang tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki surplus untuk didistribusikan ke daerah lain. Pada periode yang sama yaitu Januari hingga Oktober 2024, Kabupaten sumedang mampu mendistribusikan beras lokal ke daerah lain mencapai 131,879 ton. Surplus ini menjadi indikator positif bagi kemandirian pangan daerah, sekaligus mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal. Dengan surplus produksi yang besar, Kabupaten Sumedang memiliki peluang untuk menjadi pemasok beras bagi wilayah lain di Indonesia. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat posisi Sumedang dalam rantai pasok pangan nasional. Ekspor antarwilayah dapat dilakukan dengan memperkuat sistem logistik dan transportasi serta menjamin kualitas beras yang dihasilkan melalui standarisasi.

Meskipun memiliki potensi besar dengan lahan yang masih banyak, kemandirian pangan di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala adalah ketergantungan tinggi pada beras sebagai pangan pokok. Diversifikasi pangan belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat, sehingga resiko ketergantungan terhadap satu jenis komoditas, yaitu beras, menjadi tantangan tersendiri. Dalam jangka panjang, diversifikasi perlu didorong untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kurangnya regenerasi profesi petani juga menjadi tantangan untuk kedepannya. Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mengungkapkan bahwa banyak generasi muda di Kabupaten Sumedang yang enggan untuk melanjutkan profesi petani dan lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian di daerah lain, atau biasanya di perkotaan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan regenerasi profesi petani yang harus ditingkatkan.

Masalah penyusutan lahan pangan padi juga menjadi isu yang mengkhawatirkan. Walaupun penyusutan lahan pangan padi tidak menjadikan kekurangan pemenuhan kebutuhan beras lokal, tapi hal ini bisa menjadi masalah kedepannya. Dilansir dari detik jabar, menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang, luas tanam padi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh proyek strategis nasional dan proyek hunian. Pada tahun sebelumnya luas tanam padi di Sumedang berada di sekitar 89.000 - 90.000 hektar, namun sayangnya pada tahun 2023 luas tanam padi tersebut menyusut menjadi 74.000 hektar. Menyusutnya luas tanam padi ini adalah imbas dari Waduk Jatigede, proyek jalan tol, pembangunan perumahan dan toko, dan lain sebagainya. Penyusutan ini diprediksikan akan terus terjadi karena akan diadakannya Proyek Rebana Metropolitan. Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi kemandirian Kabupaten Sumedang.

**SIMPULAN**  
**Kesimpulan**

Pangan pokok merupakan elemen utama dalam ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sumedang, dengan beras sebagai komoditas utama. Berdasarkan data pola konsumsi pangan, rata-rata konsumsi beras per orang mencapai 266,6 gram per hari, menunjukkan dominasi beras sebagai sumber karbohidrat utama. Dominasi ini didukung oleh kondisi geografis Sumedang yang memiliki kawasan agraris memadai serta budaya konsumsi beras yang telah berlangsung lintas generasi. Selain beras, beberapa komoditas seperti singkong, jagung, ubi jalar, dan kentang dikonsumsi sebagai pelengkap, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan, terutama melalui program-program pemberdayaan petani, pengembangan infrastruktur, dan pengaturan penggunaan lahan. Salah satu program utama adalah "Sekolah Lapangan," yang berfungsi sebagai sarana pelatihan serta pendampingan berkelanjutan bagi petani. Selain itu, pengadaan sarana seperti pompa air dan traktor serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Perda Nomor 2 Tahun 2022 menjadi landasan kebijakan dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak teratur, menjaga ketersediaan lahan pertanian, dan mendukung kemandirian pangan lokal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mempertahankan Sumedang sebagai daerah agraris yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan regional dan nasional.

Dari sisi produksi, Kabupaten Sumedang menunjukkan kemandirian pangan yang kuat. Pada periode Januari hingga Oktober 2024, produksi beras mencapai 230.582 ton, jauh melampaui kebutuhan lokal sebesar 85.729 ton. Surplus sebesar 131.879 ton menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal, sekaligus membuka peluang sebagai pemasok pangan ke daerah lain.

Berisi hasil penelitian tanpa mengulang dimensi atau teori yang telah digunakan pada hasil dan pembahasan penelitian ataupun yang berada di pendahuluan penelitian, serta dituangkan secara deskriptif (tidak berbentuk pointer). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam diversifikasi pangan, regenerasi petani, dan pengelolaan lahan.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumedang telah mencapai kemandirian pangan dalam konteks pangan pokok yaitu beras. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui program-program dan kebijakannya telah menjalankan peran yang cukup baik dalam rangka upaya mewujudkan kemandirian pangan pokok. Disamping daripada peran pemerintah yang sudah cukup baik, terdapat faktor-faktor pendukung lainnya seperti kondisi geografis yang memuluskan jalan Kabupaten Sumedang menuju kemandirian pangan pokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, N. (2023, september 5). Menyusutnya Lahan Tanam Padi di Sumedang. *detikjabar*  
<https://www.detik.com/jabarberita/d-6912392-menyusutnya-lahan-tanam-padi-di-sumedang>
- Dinas Pertanian. (2020, June 8), Lahan Sawah Berkurang Tapi Tak Menurunkan Produksi Pangan, *sumedangkab.go.id* [hitpamedangkab.go.id/berita/detail/lahan-sawah-berkurang-tapi-tak-menurunkan-produksi-pangan](http://hitpamedangkab.go.id/berita/detail/lahan-sawah-berkurang-tapi-tak-menurunkan-produksi-pangan)
- Elizabeth, R. (2011). Strategi pencapaian diversifikasi dan kemandirian pangan Antara harapan dan kenyataan. *Iptek Tanaman Pangan*, 6(2), 230-242.
- Holt, S., Petocz, P, Farmakalidis, E., & Miller, J.C. B. (1995, September). Indeks Rasa kenyang dari makanan umum. *Jurnal Nutrisi Klinis Eropa*, 49(9)
- Kaho, Josef Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI
- Kandola, A. (Rabu, November 2023). Makanan Apa yang Paling Mengenyangkan? *Medical News Today*, [humswww.medicalnewstoday.com/articles/324078](https://www.medicalnewstoday.com/articles/324078)
- Nurcholis, Hanif (2007) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Jakarta: Grasindo
- Purwaningsih, Dkk. (2010). Analisis Permintaan Pangan rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan Di Provinsi Sulawesi Utara (analisis data susenas 2008). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal

- Eko-Regional FE UNSOED, Volume 5, Nomor 1. Maret 2010.
- Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan). PT Mutiara Sumber Widya.
- Situs Web Pemerintah Kabupaten Sumedang (2024). Pemda Kabupaten Sumedang Ajukan Bantuan 230 Pompa Air. <https://sumedangliah.go.id/berita/penda-kabupatensurnodang-ajukan-bantuan-210-pompa-air>
- Situs Web Radar Suara. (2024). Pemkab Sumedang Alokasikan Anggaran hingga Rp10,8 Miliar Bangun Jalan Usaha Tani <https://www.radarmara.com/berita/1711332810-pemkab-sumedang-alokasikan-anggaran-hingga-108-miliar-hangun-jalan-usaha-tani>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Surya, H. (2024, February 5). Optimisme Sumedang Pertanian Maju, Ekonomi Berkembang dan Rencana Ambisius 2024. Sumedang Pikiran Rakyat <https://fumedang.pikiran-rakyat.com/sumedang/pr-567682448/optimisme-sumedang-pertanian-maru-ekonomi-berkembang-dan-rencana-ambisius-2024>
- Taliziduhu Ndraha (2003). Kybernologi Ilma Pemerintahan 1. PT. Rineka Cipta
- YP, N. M. S. (2008). Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul. *Economic Journal of Emerging Markets*.